

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia bukan hanya didukung oleh suatu sektor tertentu melainkan juga mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai sektor yang lain salah satunya yaitu sektor pertanian, sektor ini berperan dengan cukup besar dalam hal tersebut, mengingat Indonesia juga telah dikenal oleh dunia sebagai negara agraris. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat Indonesia memilih bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Sektor pertanian merupakan ladang yang diharapkan oleh petani guna memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, sektor ini juga ikut berpartisipasi dalam laju perekonomian negara dengan memberikan *Profitability* negara yang cukup besar serta menyediakan dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia.<sup>1</sup>

Petani merupakan sebuah elemen atau pilar dalam perputaran sektor pertanian tersebut. Maka dari itu butuh adanya simpati dan perhatian secara khusus dari pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian dengan mencetus dan menjalankan sebuah kebijakan. Implementasi dari sebuah kebijakan tersebut juga merupakan sebuah upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya yang bekerja sebagai petani.

Petani membutuhkan beberapa hal-hal penunjang dalam mendukung terpeolehnya hasil pertanian yang maksimal salah satunya pupuk. Pupuk

---

<sup>1</sup> Mi'rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan", *Jurnal Agristan*, Volume 2, Nomor 1 (Mei 2020), 53.

merupakan sebuah media dalam proses pemberian zat hara pada tanaman atau dapat disebut dengan proses pemupukan. Pemupukan adalah suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman secara maksimal. Jadi, tolak ukur keberhasilan seorang petani bergantung pada hasil panen yang akan didapat dimana hasil panen akan menguntungkan serta dapat membawa kerugian apalagi jika mengalami gagal panen. Dalam hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat memerhatikan secara khusus terhadap petani dengan menjadi *fasilitator* yang menyediakan atau memudahkan hal-hal yang dibutuhkan oleh petani dalam pertaniannya serta upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia agar krisis pangan tidak akan terjadi.

Krisis pangan adalah salah satu permasalahan serius yang dialami berbagai dunia pada saat ini, hal tersebut dikuatkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo pada pembukaan G20 di Bali pada bulan November 2022 lalu. Beliau berpesan kepada perwakilan negara yang tergabung pada G20 untuk lebih memerhatikan dan memprioritaskan dalam mengatasi permasalahan krisis pangan yang terjadi pada negara berkembang, hal tersebut merupakan sebuah akibat adanya peperangan Geo-Politik yang terjadi antara Negara Rusia dan Ukraina. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya dukungan dari negara yang tergabung G7 untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi krisis pangan tersebut melalui dua cara yang dapat terealisasi yaitu memfasilitasi Ukraina agar ekspor gandum dapat segera berjalan serta menjalin komunikasi secara intens kepada dunia bahwa suatu negara tidak akan mendapatkan sanksi jika mengimpor komoditas pangan dan pupuk dari Rusia.

Presiden Jokowi menaruh perhatian yang besar pada permasalahan tersebut dan menyatakan bahwa khusus untuk pupuk, jika tidak mengatasi dan menanganinya maka dapat dipastikan bahwa krisis pangan khususnya beras pada negara berkembang yang berkaitan dengan dua milyar manusia dapat terjadi.<sup>2</sup>

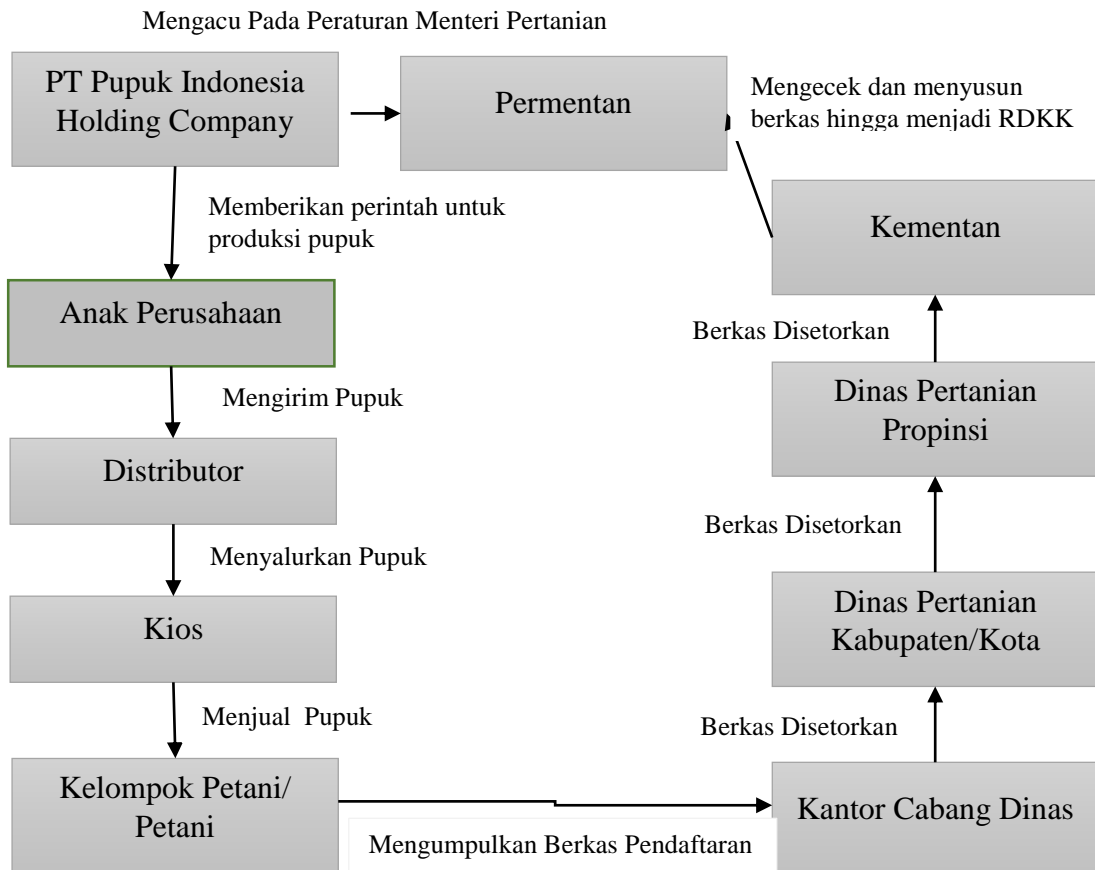
Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa pupuk merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan pangan di suatu negara khususnya negara Indonesia melalui keberhasilan dari sektor pertanian. Sebab pupuk adalah salah satu komponen utama dari pertanian, jika pupuk mengalami kendala maka akan berpengaruh pada produktivitas hasil panen. Seperti yang diketahui bahwa Panen adalah waktu yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari petani dalam bercocok tanam, apakah petani akan mendapat keuntungan atau sebaliknya. Ketika petani mengalami gagal panen serta produktivitas hasilnya dinilai rendah, hal tersebut akan berefek pada krisis pangan pula.

Pendistribusian pupuk bersubsidi telah dilakukan oleh pemerintah, hal ini merupakan sebuah jawaban atas permasalahan yang muncul pada sektor pertanian dengan menjaga ketersediaan distribusi, ketepatan sasaran yang dituju, serta jangkaunya harga pupuk. Hal-hal tersebut nantinya akan menjadi faktor pendukung guna terwujudnya peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani. Seperti halnya tabel dibawah yang menjelaskan terkait alur pendistribusian pupuk bersubsidi dan pendaftaran petani khususnya di wilayah Desa Tarokan, antara lain:

---

<sup>2</sup> “Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan,” Kemlu.go.id diakses <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3741/view/presiden-jokowi-g7-dan-g20-harus-segera-atasi-krisis-pangan>, pada 20 Januari 2023 pukul 18.35 WIB

**Gambar 1.1: Alur Pendistribusian dan Pendaftaran Petani Sebagai Penerima Pupuk Bersubsidi**



Sumber Data : Data Diolah (Hasil Observasi)

Berdasarkan skema alur distribusi diatas, alur pendistribusian pupuk bersubsidi telah diatur pada Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang upaya untuk menjaga stok serta pola distribusi pupuk bersubsidi. Sebelum mendapatkan pupuk bersubsidi yang disediakan di kios, petani harus mendaftarkan diri disertai lahan sawahnya ke Kantor Cabang Dinas dengan didampingi oleh perangkat desa, setelah itu data tersebut disalurkan ke dinas

pertanian kabupaten/kota hingga ke Kementerian Pertanian lalu direkapitulasi sampai identitas petani disertai luas lahan sawahnya terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). RDKK merupakan dokumen yang disusun oleh Kementerian Pertanian dalam upaya pemerataan penyaluran dan peningkatan ketepatan sasaran yang disuplai pupuk bersubsidi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan pupuk pada sektor pertanian akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya produksi pangan dan komoditas pertanian lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan ketersediaan pupuk baik itu dari industri pupuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Seiring dengan peran yang vital bagi sektor pertanian maka pemerintah terdorong untuk mengatur tata niaga pupuk. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah dengan subsidi. Subsidi pupuk yang diberlakukan sejak tahun 1971 bertujuan untuk menekan serta meminimalisir pengeluaran para petani dalam produksi, sehingga para petani tidak kesulitan memperoleh pupuk serta dibantu dengan biaya pupuk yang terjangkau.<sup>3</sup>

Distribusi ini membawa manfaat bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Namun, Distribusi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan pada implementasinya. Distribusi ini memiliki kelebihan yang sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu menyuplai pupuk kepada petani untuk meminimalisir pengeluaran dari petani demi mewujudkan kesejahteraan petani pula, sedangkan distribusi ini memiliki kekurangan yaitu menjadikan petani sangat bergantung pada pupuk bersubsidi tersebut, pemikiran petani yang hanya bergantung pada pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah walaupun

---

<sup>3</sup> Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 95

pupuk tersebut mengandung zat kimia, banyak dari petani yang enggan memikirkan sebuah alternatif maupun hal yang inovatif terhadap permasalahan pupuk bersubsidi yang sering terjadi yaitu sangat terbatas, padahal ada jenis pupuk yang dapat dikelola sendiri yaitu pupuk kandang atau pupuk kompos.

Pupuk kompos sendiri memiliki kandungan yang lebih aman, harga yang terjangkau serta bahan baku yang mudah ditemukan dan tidak terbatas.<sup>4</sup> Kurang adanya inovasi ataupun kreativitas menjadi salah satu faktor tergantungnya petani pada pupuk yang disediakan oleh pemerintah, padahal dengan adanya pupuk alternatif ini yang berasal pada pupuk kandang lebih terjangkau baik dari jumlah pupuk yang tidak dibatasi, harga yang lebih terjangkau, dan bahan baku yang mudah ditemukan. Mungkin dengan adanya mahasiswa di bidang pertanian nantinya akan mencetus sebuah inovasi guna membantu kesejahteraan petani dalam hal penyediaan pupuk organik, hal ini menjadi langkah awal jika nantinya pupuk bersubsidi ditiadakan oleh pemerintah.

Pertanian merupakan ladang pendapatan dan penghasilan yang diharapkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, jika harapan tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang diperoleh tentu dari petani berpikir hal yang menyebabkan atas timbulnya permasalahan tersebut. Para petani juga akan mengkritik kinerja dari pemerintah yang pencetus suatu kebijakan demi peningkatan bahan pangan di Indonesia yang dinilai masih kurang dalam memfasilitasi sektor pertanian di Indonesia. Pada hakikatnya keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dengan cara yang tidak sulit, cara

---

<sup>4</sup> Ishak Juarsah, *Pemanfaatan Pupuk Organik Untuk Pertanian Organik dan Lingkungan Berkelanjutan* (Bogor: Balai Penelitian, 2014), 128-129.

tersebut ialah dengan melihat apakah di kebijakan tersebut telah terdapat peningkatan kesejahteraan petani atau tidak serta apakah sektor pertanian telah ditetapkan sebagai landasan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keberlanjutan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Kriteria peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perbaikan pendapatan yang diperoleh, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pada indikator makro seperti pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pertanian ini dikatakan berhasil jika sudah meningkatkan kesejahteraan para petani dan sektor ekonomi menjadi sektor yang berpengaruh dan menjadi pendorong pada sektor-sektor lainnya.<sup>5</sup>

Sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki peran yang vital bagi ketahanan pangan di Indonesia, ketercukupan pangan harus menjadi prioritas dalam perekonomian di Indonesia, sedangkan jika melihat dari sisi lain, tingkat kesejahteraan para petani yang menjadi pilar penting dalam ketahanan pangan ini yang masih terkendala dengan pendapatan yang sebatas cukup untuk memenuhi kebutuhannya karena harga beras yang masih rendah. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dari seluruh kebijakan terkait sektor pertanian juga harus menjadi fasilitator bagi para masyarakatnya yang bekerja sebagai petani maupun buruh tani demi hasil pertanian yang bagus baik dari segi kualitas serta kuantitas. Karena Produktivitas sektor pertanian menjadi tolak ukur pada kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Indonesia. Karena semakin rendah produktivitas pertanian semakin rendah pula kontribusi sektor ini pada perekonomian nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bustanul Arifin, *Ekonomi Pembangunan Pertanian* (Bogor : Percetakan IPB, 2013), 1-2

<sup>6</sup> Mardia. dkk, *Ekonomi Pertanian* (Medan: yayasan kita menulis, 2021), 12

Optimalisasi dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sangat diperlukan terkait dengan hal-hal yang mendukung pada sektor pertanian guna menjamin ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga dan meminimalisir adanya krisis pangan yang pada saat ini telah dirasakan oleh beberapa negara lain. selain itu kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kesejahteraan petani dapat dikategorikan dengan kesejahteraan pada umumnya sebab memiliki tujuan yang sama yaitu dapat memenuhi kebutuhannya.

Definisi Kesejahteraan pada umumnya yaitu keadaan pada saat suatu individu dapat memenuhi kebutuhan primer, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sekunder yang menjadi penunjang dalam kesehariannya, seperti pendidikan dan mempunyai pekerjaan atau membuat usaha agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan sehingga dapat disetarakan dengan orang lain dalam status sosial serta dapat memutar roda perekonomian.<sup>7</sup> Dengan adanya pendistribusian ini dapat membantu petani guna mencapai kesejahteraan demi mencukupi kebutuhan primer. Hubungan keduanya dapat dikatakan saling berkaitan dimana kesejahteraan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh setiap individu, dalam prosesnya harus ada usaha yang kuat. Maka dari itu pendistribusian ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat membantu petani untuk mencapai kesejahteraan yang nyata.

---

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Pertama, 2015), 86.



**Tabel 1. 1: Indikator Kesejahteraan Beberapa Petani di Desa Tarokan Sebagai Penerima Pupuk Bersubsidi**

No.	Kategori	Nama	Hasil
1.	Pendapatan	Bapak Muji	Jika hanya bertani tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari
		Bapak Rebo	Mampu mendapatkan keuntungan yang cukup untuk kebutuhan pokok dan modal musim selanjutnya.
		Bapak Bari	Pendapatan setiap musim mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
		Bapak Kamto	Mendapat keuntungan setiap musimnya untuk memenuhi kebutuhan pokok.
		Bapak Paeman	Mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan mempunyai modal yang cukup untuk musim panen selanjutnya.
		Bapak Samiran	Mendapatkan laba bersih senilai Rp 1.200.000 yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan modal musim tanam selanjutnya
		Bapak Masrudin	Keuntungan yang masih kecil sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya
2.	Kesehatan	Bapak Muji	Memberikan makanan yang bergizi pada keluarganya secara sederhana
		Bapak Rebo	Memberikan makanan yang sederhana tapi tetap bergizi
		Bapak Bari	Memberikan makanan yang sehat untuk keluarganya
		Bapak Kamto	Mampu membelikan makanan yang bergizi tinggi untuk keluarganya
		Bapak Paeman	Memberikan makanan yang bergizi setiap harinya
		Bapak Samiran	Setiap minggu sekali mampu membelikan lauk makan yang bergizi.
		Bapak Masrudin	Belum mampu memberikan makanan yang bergizi secara rutin, setiap harinya dengan lauk yang sederhana.
3.	Pendidikan	Bapak Muji	Mampu menyekolahkan anaknya hingga tingkat kuliah, meski dengan bantuan dana beasiswa
		Bapak Rebo	Hanya mampu menyekolahkan anaknya ke tingkat SMP
		Bapak Bari	Mampu menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMA

		Bapak Kamto	Mampu menyekolahkan anaknya hingga bangku kuliah
		Bapak Paeman	Tidak mampu mendorong anaknya meneruskan sekolahnya, sebab dari keinginan anaknya yang lebih ingin bekerja
		Bapak Samiran	Mampu menyekolahkan ketiga anaknya sampai tingkat perkuliahan dengan bantuan beasiswa.
		Bapak Masrudin	Mampu membiayai kedua anaknya yang masih Sekolah Dasar (SD)
4.	Tabungan	Bapak Muji	Belum mampu menyisihkan pendapatan untuk tabungan
		Bapak Rebo	Masih belum punya tabungan yang banyak, sebab keuntungan yang didapat untuk kebutuhan dan modal musim panen selanjutnya
		Bapak Bari	Mampu menyisihkan pendapatan untuk tabungan meskipun sedikit.
		Bapak Kamto	Hanya dapat menyisihkan pendapatan sedikit untuk tabungan
		Bapak Paeman	Belum mampu untuk menyisihkan pendapatan untuk tabungan
		Bapak Samiran	Mampu menyisihkan keuntungan yang sedikit untuk menabung
		Bapak Masrudin	Belum mampu menyisihkan keuntungan, ditambah dengan belum tercukupinya kebutuhan pokok.

Sumber : Data diolah (Hasil Wawancara)

Sesuai dengan data diatas, peran pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pokok dari petani sangat cukup berpengaruh. Meskipun tidak signifikan, tapi petani dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya ataupun keluarganya demi mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan oleh petani tersebut.

Pendistribusian pupuk bersubsidi ditujukan ke seluruh daerah di Indonesia, salah satunya daerah yang ingin diteliti oleh peneliti berada pada Kecamatan Tarokan, Kecamatan Tarokan merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Kediri yang memiliki wilayah seluas 47,89 Km

persegi yang terbagi menjadi 10 Desa dengan rincian luasnya masing-masing, diantaranya :

**Tabel 1. 2: Luas Wilayah Desa di Kecamatan Tarokan Pada Tahun 2021**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Desa Tarokan	16,95
2.	Desa Bulusari	10,04
3.	Desa Kalirong	2,06
4.	Desa Kaliboto	3,40
5.	Desa Kedungsari	1,91
6.	Desa Sumberduren	2,17
7.	Desa Kerep	2,59
8.	Desa Blimbing	2,47
9.	Desa Cengkok	3,10
10.	Desa Jati	3,21
	<b>Jumlah</b>	<b>47,89</b>

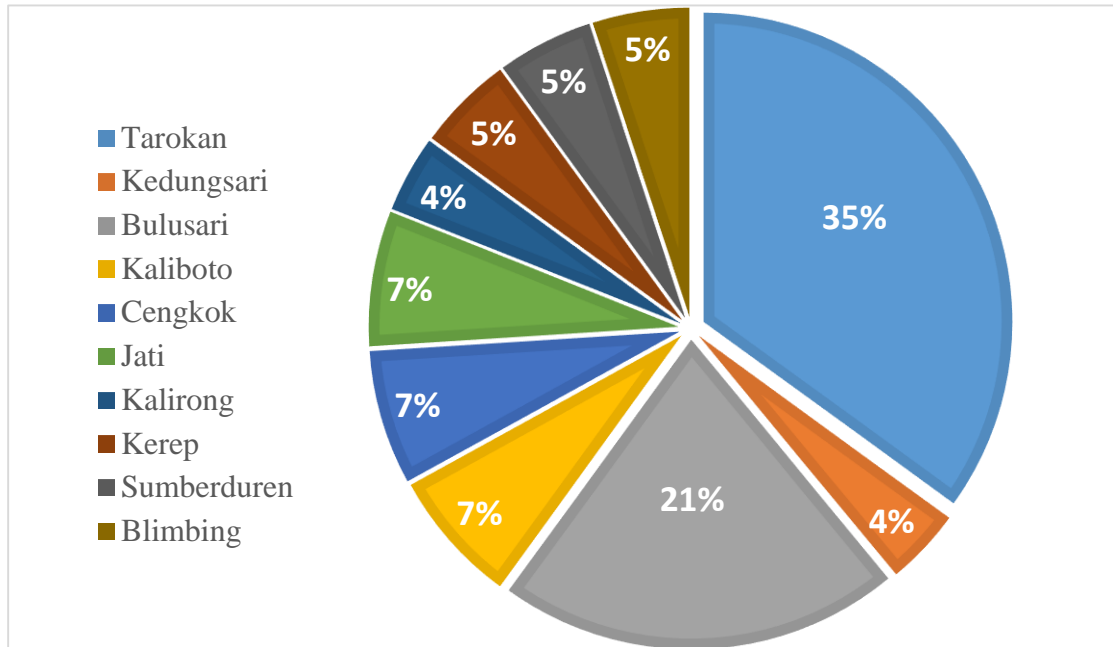
Sumber Data: Bps Kabupaten Kediri

Kecamatan ini merupakan perbatasan dari Kabupaten Nganjuk pada sisi barat dan utara, di sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Grogol, dan disisi Selatan berbatasan dengan wilayah bukit dan perhutani. Adapun persentase wilayah dari Kecamatan Tarokan secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa Desa yang termasuk pada kecamatan tersebut, antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “Kecamatan Tarokan Dalam Angka 2022, “<https://kedirikab.bps.go.id> diakses pada 28 September 2022 pukul 23.10 WIB.5

**Gambar 1. 1: Persentase Luas Desa di Wilayah Kecamatan Tarokan Pada Tahun 2021**



Sumber Data : BPS Kabupaten Kediri.

Dilihat dari diagram lingkaran diatas dapat disimpulkan bahwa Desa yang terluas di wilayah Kecamatan Tarokan yaitu Desa Tarokan. Desa ini memiliki luas wilayah terbesar dengan persentase yaitu 35% , Desa dengan wilayah luas setelah Desa Tarokan Yaitu Desa Bulusari, sedangkan Desa Kedungsari merupakan desa yang memiliki luas paling kecil dengan persentase hanya 4% dari total keseluruhan wilayah Kecamatan Tarokan.

Kecamatan Tarokan juga terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari lahan sawah, sesuai dengan penggunaannya berdasarkan data tahun 2021 yang peneliti peroleh, terinci sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ibid, 95.

**Tabel 1. 3: Jumlah Luas Lahan Pertanian Sawah di Kecamatan Tarokan Pada Tahun 2021**

<b>Desa</b>	<b>Lahan Sawah Irigasi (ha)</b>	<b>Lahan Sawah Non Irigasi (ha)</b>	<b>Lahan Pertanian Sawah (ha)</b>
Tarokan	186,296	89,354	275,650
Bulusari	102,842	101,156	203,998
Kalirong	70,809	-	70,809
Kaliboto	171,122	15,173	186,295
Kedungsari	134,032	11,802	145,834
Sumberduren	86,826	-	86,826
Kerep	121,387	-	121,387
Blimbing	110,429	-	110,429
Cengkok	132,346	-	132,346
Jati	212,427	-	212,427
<b>Total</b>	<b>1.328,516</b>	<b>217,485</b>	<b>1.546,001</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Kediri.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Desa Tarokan merupakan desa yang memiliki lahan pertanian sawah terluas dibandingkan desa lainnya. Maka dari itu, persentase kebutuhan pupuk petani Desa Tarokan juga sangat besar, hal ini didorong dengan kebutuhan pupuk yang didasari oleh luas lahan yang termasuk pada wilayah Desa Tarokan. Sebab semakin luas lahan pertanian maka semakin banyak juga kuantitas pupuk yang diperlukan.

Peneliti membandingkan antara Desa Tarokan dan Desa Kerep dengan alasan yaitu Desa Kerep merupakan desa yang terdiri dari Petani non palawija yang tinggi, hal tersebut juga berpengaruh pada pendistribusian pupuk bersubsidi di desa kerep. Berikut perbedaan dari kedua desa tersebut, antara lain :

**Tabel 1. 4: Pembandingan Desa Tarokan dan Desa Kerep**

No	Pembandingan	Desa Tarokan	Desa Kerep
1.	Luas Wilayah	Desa Terluas di Kecamatan Tarokan Dengan persentase 35%	Desa hanya memiliki luas dengan persentase 5%
2.	Jumlah Kelompok Tani	Kelompok tani Desa Tarokan berjumlah 7 kelompok	Kelompok tani Desa Kerep berjumlah 4 Kelompok
3.	Jenis Pertanian	Mayoritas pertanian palawija (Padi dan Jagung)	Pertanian palawija (Padi dan Jagung) dan non palawija (Bawang Merah dan sebagainya)
4.	Jenis Pupuk yang disubsidikan	Urea dan Phonska	Urea, Phonska, Sp-36, dan ZA
5.	Jenis Wilayah	Dataran rendah dan dataran tinggi	Dataran rendah

Sumber : Data Diolah (Hasil Observasi)

Berdasarkan data pembandingan antara Desa Tarokan dan Desa Kerep. Peneliti memilih Desa Tarokan sebagai lokasi penelitian. Desa Tarokan merupakan desa dengan wilayah terluas di kecamatan tarokan dan terdiri dari 10 dusun, hal ini juga didorong dengan jumlah petani yang tergabung pada kelompok tani, kelompok tani ini terbentuk pada dusun masing-masing. Oleh karena itu, kebutuhan pupuk bersubsidi para petani di Desa Tarokan juga sangatlah tinggi dibandingkan dengan desa yang lain serta melihat banyaknya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani serta peneliti juga tertarik

dengan petani di wilayah Desa Tarokan hanya mendapatkan 2 jenis pupuk saja dibandingkan dengan desa lainnya seperti Desa Kerep yang mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 4 jenis.

Pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Tarokan mengalami berbagai permasalahan seperti mekanisme pembelian pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai semakin menyulitkan para petani, pembelian pupuk bersubsidi yang harus memenuhi persyaratan yang berlaku seperti mentanda tangani form pembelian yang harus ditandatangani sendiri oleh pemilik lahan tidak dapat diwakilkan oleh saudara atau orang lain meskipun dengan membawa kartu tani dari pemilik lahan, titik permasalahannya jika pihak yang mengurus lahan tersebut adalah orang lain sedangkan pemilik lahan sedang merantau, alhasil tidak dapat mengambil atau membeli pupuk bersubsidi, serta jika pemilik lahan merupakan lansia, beliau harus jauh-jauh dari rumah dengan diantarkan anaknya. Rumitnya sistematika ini ditambah dengan pengurangan jatah pupuk bersubsidi yang diterima oleh para petani setiap tahunnya. Hal tersebut memicu kekecewaan para petani dengan hasil pertanian yang tidak memuaskan karena tidak imbangnya antara pupuk yang didapatkan dengan luas lahan yang dimiliki. Selain itu, adanya indikasi permainan dalam distribusi yang melibatkan beberapa pihak, seperti memberi harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dan adanya pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan secara ilegal.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam alur pendistribusian pupuk bersubsidi yang dijalankan oleh pemerintah untuk memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan para petani menjadi sebuah pertanyaan, apakah

sistem pendistribusian pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai masih belum efektif dan berjalan dengan lancar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah:

1. Mengetahui bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan.
2. Mengetahui efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian pupuk yang dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan petani..

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan dijadikan bahan kajian serta menambah wawasan bagi para petani terkait kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya kesejahteraan petani.

3. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi peneliti yang ingin lebih jauh lagi mengkaji mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian pustaka ini peneliti sudah menemukan beberapa referensi yang dapat dijadikan untuk bahan rujukan dalam penulisan proposal penelitian, yaitu sebagai berikut

*Pertama*, Skripsi karya Ikbal (UNMUH Makassar,2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Samaenre

Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”.<sup>10</sup> Hasil referensi penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia sangat dibutuhkan oleh warga sekitar yang bermata pencaharian sebagai petani serta adanya penerapan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Persamaan dengan penelitian dari peneliti adalah membahas tentang pentingnya distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani untuk menekan pengeluaran dalam bertani. Sedangkan perbedaan dengan penelitian dari peneliti terletak pada rencana penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian.

*Kedua*, Skripsi karya Naela Safitri (UNNES Semarang, 2018) dengan judul “Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Padi di Kabupaten Demak”.<sup>11</sup> Hasil referensi penelitian tersebut menunjukkan pada tingkat efektivitas suatu kebijakan subsidi pupuk yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas padi dari para petani di wilayah Kabupaten Demak. Persamaan dengan penelitian dari peneliti yaitu juga membahas tentang efektif atau tidaknya terkait kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang digagas oleh pemerintah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian dari peneliti terletak pada tujuan kebijakan pupuk bersubsidi, pada referensi penelitian tersebut adalah meningkatkan produktivitas padi sedangkan dari peneliti yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pada penelitian tersebut tidak

---

<sup>10</sup> Ikkal, “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang” (Skripsi, UNMUH Makassar, 2017).

<sup>11</sup> Naela Safitri, “Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Padi di Kabupaten Demak” (Skripsi, UNNES Semarang, 2018).

mencantumkan sistem jual beli pupuk bersubsidi dan berfokus pada kebijakan pupuk bersubsidi secara global.

*Ketiga*, skripsi karya Siti Ngatini (IAIN Kediri,2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur”.<sup>12</sup> Hasil referensi penelitian tersebut menunjukkan tentang sebuah praktik sistem jual beli pupuk bersubsidi di suatu daerah serta membahas tentang hukum islam dari jual beli pupuk bersubsidi. Persamaan dengan penelitian dari peneliti terletak pada sistem jual beli yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta lokasi penelitian yang sama terletak pada daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan perbedaan dengan penelitian dari peneliti terletak pada objek permasalahan, pada referensi penelitian tersebut membahas tentang hukum islam yang mengacu pada sistem jual beli pupuk bersubsidi, sedangkan dari peneliti lebih mengarah pada pembahasan tentang efektivitas dari distribusi pupuk bersubsidi.

*Keempat*, skripsi karya Diana Dwi Ekasari (IAIN Kediri,2021) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kimia Melalui Sistem Pembayaran Kartu Tani (Studi Kasus di Kelompok Tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo)”.<sup>13</sup> Hasil referensi penelitian tersebut membahas tentang hukum islam pada suatu kebijakan yaitu sistem pembayaran jual beli pupuk bersubsidi yang menggunakan kartu tanoi sebagai alatnya. Persamaan

---

<sup>12</sup> Siti Ngatini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur” (Skripsi, IAIN Kediri, 2019).

<sup>13</sup> Diana Dwi Ekasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kimia Melalui Sistem Pembayaran Kartu Tani (Studi Kasus di Kelompok Tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2021).

dengan penelitian dari peneliti adalah membahas tentang sistematika jual beli pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian dari peneliti terletak pada rencana lokasi penelitian yang dituju dan permasalahan yang diangkat oleh referensi penelitian tersebut yang lebih mengarah pada pembahasan sistem pembayaran jual beli pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani serta hukum islam yang melekat pada sistem tersebut.

*Kelima*, skripsi karya Khoerul Aziza (IAIN Purwokerto,2021) dengan judul “Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani Di Purwokerto Timur”.<sup>14</sup> Hasil referensi penelitian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dari distribusi pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani sebagai alat transaksi pada pembelian pupuk bersubsidi. Persamaan dengan penelitian dari peneliti adalah keduanya membahas tentang efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada rencana lokasi penelitian serta pada referensi penelitian tersebut juga menggunakan kartu tani yang menjadi alat transaksi sebagai salah satu objek penelitian.

---

<sup>14</sup> Khoerul Aziza, “Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani Di Purwokerto Timur” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).